

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat

Yenni Del Rosa

Dosen Tetap Universitas Dharma Andalas
Correspondence email: rosa.yennidel@yahoo.com

Abstract. *This research aims to analyze how much influences the economic growth, inflation and unemployment poverty the province West Sumatra. Economic growth, inflation and employment panel data were collected from thr Central Statistics Agency in 2014 – 2018 with saturated sampling technique. Multiple regression equation obtained from this study $Y = 179,02 - 0,087 X_1 - 0,033X_2 + 0,006X_3 + e$ with a coefficient of determination of 0.949 and a correlation coefficient of 0.866 and adjusted R square 0,549 . After testing the hypothesis turns out the hypothesis is accepted where economic growth and inflation significant negative effect on poverty and unemployment has no significant positive effect on poverty.*

Keywords: *economic growth, inflation, unemployment and poverty.*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2018 mencapai 353,24 ribu orang (6,55%) dan tahun 2017 sebanyak 529,2 ribu orang (11,9%). Jika dibandingkan dengan bulan September 2017 jumlah penduduk miskin turun sebanyak 6,76 ribu orang (BPS, 2019). Tentunya ini tidak terlepas dari program pemerintah untuk masyarakat miskin seperti bantuan sosial, beras dan lain sebagainya. Penurunan jumlah penduduk miskin paling tinggi terjadi di desa atau nagari sedangkan di kota jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 118,84 ribu orang menjadi 125,28 ribu orang (meningkat 10,74 ribu orang). Sementara di desa terjadi penurunan sebanyak 14,63 ribu orang dengan total penduduk miskin di desa menjadi 353,24 ribu orang. Penurunan kemiskinan harus didorong oleh semua sektor dengan membuka berbagai lapangan kerja. Garis kemiskinan merupakan pengeluaran rata-rata per kapita per bulan yang digunakan untuk mengklarifikasi penduduk masuk kelompok miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan provinsi Sumatera Barat Rp 485.633 per kapita per bulan pada September 2018 Dalam satu rumah tangga terdiri dari 5 orang maka angka pengeluarannya harus di atas Rp 2.428,165 untuk seluruh anggota keluarga per bulan. (BPS, 2019). Jika pengeluarannya di bawah batas tersebut maka keluarga tersebut dianggap miskin dan sebaliknya. Garis kemiskinan mengacu kepada garis kemiskinan makanan dan non makanan dimana untuk garis kemiskinan makanan menggunakan batas konsumsi kalori per kapita per hari 2.100 kcal. Peranan makanan terhadap perhitungan garis kemiskinan lebih besar dibanding komoditas non makanan dimana sumbangannya mencapai 76,43%. Di sisi lain tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumatera Barat justeru mengalami ketimpangan. Menurut (Todaro, 2012) pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Usaha pemerintah pusat maupun daerah dalam pengentasan kemiskinan sangat serius sebagai salah satu program prioritas pemerintah provinsi Sumatera Barat. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal karena masih terdapat kesenjangan antara rencana dan program pengentasan kemiskinan yang lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu perlu strategi pengentasan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi ditumpu oleh beberapa lapangan usaha tanpa industri pengolahan yang sedang lesu. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga pertumbuhan tertinggi 6,61% (BPS, 2019). Dari waktu ke waktu pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terlihat penurunan, biasanya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selalu lebih tinggi dibanding tingkat nasional. Segi pengeluaran terdapat dua komponen yang pertumbuhannya minus yakni belanja pemerintah -2,9% dan ekspor luar negeri -19,71%. Khusus untuk ekspor luar negeri penurunan akibat anjloknya produk CPO. Sementara untuk impor penurunan disebabkan karena berkurangnya *supply* barang impor.

Pengaruh terbesar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di sektor pertanian, perdagangan dan transportasi. Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi 23,59% hanya sanggup tumbuh 2,35% tahun 2018 sementara tahun 2017 tumbuh 4,12%. Alasan melambatnya pertumbuhan di sektor pertanian karena musim panen yang bergeser dan luas area panen yang berkurang. Sementara industri pengolahan menyumbang 9,18% pada pertumbuhan ekonomi justru tumbuh negatif sebesar -2,29% pada hal tahun 2017 industri pengolahan mencakup produk CPO bisa tumbuh 3,8%. Selain itu sektor perdagangan juga tumbuh melambat di angka 5,46% karena produksi perlambatan barang domestik dan penurunan *supply* barang impor. Sejumlah catatan lain yang ikut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diantaranya penurunan pertumbuhan industri makanan minuman akibat *output* pengolahan sawit yang berkurang dan realisasi belanja pemerintah tahun 2018 yang berkontraksi 5,09% . Luas area panen yang merosot dan produksi semen yang ikut berkurang tahun 2018 juga memberikan sumbangan terhadap perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Afdal, 2018) menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Inflasi tahunan Sumatera Barat tahun 2018 (2,60%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 (2,03%) namun lebih rendah dibandingkan inflasi rata-rata tiga tahun terakhir. Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi terendah kelima di kawasan Sumatera dan terendah ketujuh secara nasional (BPS, 2019). Terkendalinya tekanan inflasi 2018 tidak terlepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sumatera Barat dalam upaya pengendalian inflasi di daerah secara konsisten dan berkelanjutan dengan melakukan penguatan sinergi dan koordinasi antara TPID provinsi dengan TPID kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Wujud nyata upaya TPID Sumatera Barat dalam pengendalian inflasi dengan menyusun dan melaksanakan program kerja pengendalian inflasi daerah 2018 mengacu pada peta jalan TPID tahun 2016 – 2019 yang fokus pada stabilitas harga komoditas penyumbang inflasi khususnya beras, cabe merah, bawang merah, telur dan daging ayam ras. Program kerja tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah atau gangguan dari berbagai aspek mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, tata niaga, kelembagaan, regulasi, akses dan infrastruktur hingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Program kerja pengendalian inflasi Sumatera Barat meliputi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, sidak pasar, peluncuran Toko Tani Indonesia Center (TTIC) untuk memotong rantai penjualan dan menyediakan pangan murah serta berkualitas. Kemudian perbaikan irigasi pertanian, peningkatan akses jalan pertanian, monitoring distribusi pemasaran produksi hingga kerja sama perdagangan dengan daerah lain.

Jumlah pengangguran di Sumatera Barat 152.241 orang terjadi peningkatan 0,22% dari tahun sebelumnya 151.900 orang meningkat 341 orang dari tahun 2017 (BPS, 2019). Sedangkan angkatan kerja di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan 2,59 juta (4,75%) dari tahun 2017 sebanyak 2,45 juta orang. Pengangguran terbanyak berasal dari lulusan D1 dan D2 mencapai 9,52% disusul lulusan SMK 9,50%, lulusan SMA 7,97%, lulusan universitas 7,27%, lulusan SD 3,43% dan lulusan SMP 3,41%. Meningkatnya angka pengangguran setiap tahun di Sumatera Barat karena Sumatera Barat merupakan daerah agraris bukan industri. Pertumbuhan angkatan kerja semakin tinggi setiap tahun namun kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja belum optimal. Meningkatnya pengangguran di Sumatera Barat karena lulusan SLTA atau SMK tidak terserap semuanya di Perguruan Tinggi sehingga angka pengangguran terbuka meningkat di Sumatera Barat. Juga jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan jumlah lowongan kerja karena jumlah lowongan kerja tidak sesuai dengan kriteria tenaga kerja. Data penelitian berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tahun 2014 – 2018 seperti Tabel 1. berikut :

Tabel 1
Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran Di Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi	Pengangguran (%)
2014	7,41	5,88	11,58	6,50
2015	7,31	5,22	4,00	6,89
2016	7,09	5,59	4,89	5,09
2017	6,75	5,26	2,03	5,58
2018	6,55	5,08	2,60	5,55

Sumber : BPS, 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Barat.

Landasan Teori

Kemiskinan adalah kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif kemiskinan merupakan keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan sedangkan secara kualitatif adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Kemiskinan lazim digambarkan sebagai gejala kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok (Elly dan Usman, 2011). Kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan terdiri dari banyak dimensi termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kebijakan minimnya kebutuhan dasar yang dirumuskan konferensi ILO tahun 1976 (Elly dan usman, 2011) sbb : 1) kebutuhan minimum suatu keluarga akan konsumsi privat, 2) pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya, 3) partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, 4) terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia, 5) penciptaan lapangan kerja sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar. Selanjutnya Elly dan Usman (2011) mengklasifikasikan dua bentuk kemiskinan sbb :

1. Kemiskinan subjektif, terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan anggapan bahwa kebutuhannya terpenuhi secara cukup walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.
2. Kemiskinan absolut yaitu bentuk kemiskinan dimana seseorang memiliki penghasilan di bawah standar garis kemiskinan (tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan).
3. Kemiskinan relatif yaitu bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat yang menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.
4. Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam sehingga masyarakat setempat produktivitasnya rendah.
5. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang terjadi karena kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.
6. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

Menurut Prathama dan Mandala (1999) konsep untuk mengukur garis kemiskinan di Indonesia adalah garis kemiskinan absolut dalam bentuk Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yaitu ukuran jumlah kalori umum yang harus dipenuhi seseorang sebesar 2.100 kalori per orang per hari. Selanjutnya (BPS, 2019) mengemukakan konsep garis kemiskinan sbb :

1. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin.
2. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
3. Garis kemiskinan non makanan yaitu kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Pendapatan dalam pendistribusiannya dianggap sempurna bila setiap individu mendapat bagian yang sama dari *output* perekonomian. Distribusi pendapatan dianggap kurang adil jika sebagian besar *output* nasional dikuasai sebagian kecil penduduk tapi distribusi pendapatan menjadi sangat tidak adil bila sebagian besar *output* nasional dinikmati hanya oleh segelintir kelompok masyarakat (Pratama dan Mandala, 1999) dengan ukuran distribusi pendapatan sbb:

1) Kurva Lorenz dimana pendapatan didistribusikan adil sempurna bila 20% keluarga paling miskin menikmati 20% pendapatan nasional, 20% kelompok keluarga berikutnya juga menikmati 20% pendapatan nasional sehingga 40% kelompok keluarga menikmati 40% pendapatan nasional. Begitu seterusnya sehingga total akumulasi 100% keluarga menikmati 100% pendapatan nasional.

2) Koefisien Gini, merupakan alat ukur *in equity income distribution* dengan menghitung luas kurva Lorenz. Menurut Nanga (2001) beberapa penyebab kemiskinan sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi maka akan mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan di suatu negara.

2. Angka pengangguran yang tinggi

Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran disuatu negara menjadi tinggi sehingga dapat menimbulkan masalah lain di masyarakat seperti munculnya pelaku tindak kejahatan.

3. Tingkat pendidikan yang rendah

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan dan pengetahuan yang memadai sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha sehingga angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah.

4. Bencana alam

Bencana alam merupakan faktor kemiskinan yang tidak dapat dicegah karena berasal dari alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor dan lain-lain yang akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun psikologis.

5. Distribusi yang tidak merata

Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan.

Sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi bila terjadi peningkatan *Gross National Product* (GNP) riil di negara tersebut sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional tapi tidak dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional (Yanuar, 2009). Terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis berdasarkan produk nasional dan komponennya tenaga kerja, penduduk dan lainnya sebagai berikut : 1) terjadi laju pertumbuhan ekonomi dan produk per kapita yang cepat, 2) adanya peningkatan produktivitas masyarakat, 3) terjadi perubahan struktural yang tinggi, 4) adanya urbanisasi dalam negara, 5) melakukan ekspansi ke negara maju, 6) terjadinya arus barang, modal dan manusia antar bangsa di dunia (Sukirno, 2006).

Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi bisnis sebagai berikut : 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya alam, 3) kemajuan IPTEK, 4) tingkat inflasi, 5) tingkat suku bunga. Sumberdaya manusia akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui kuantitas dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang banyak merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Sumberdaya alam meliputi tanah dan kekayaan alam sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara terutama dalam penyediaan bahan baku produksi. Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang bernilai lebih tinggi yang disebut juga sebagai proses produksi.

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga umum (Samuelson dan Nordhaus, 2004). Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi karena *demand pull inflation*, bertambahnya *money supply*, kenaikan biaya produksi dan kondisi ekonomi politik. Menurut teori kuantitas inflasi disebabkan oleh *money supply* dan ekspektasi

masyarakat tentang kenaikan harga di masa yang akan datang. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan secara ekonomi. Teori strukturalis, memberikan tekanan pada kekuatan struktur ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang. Menurut Case & Fair (2006) inflasi adalah naiknya peningkatan harga secara keseluruhan dimana inflasi terjadi ketika harga naik secara serentak dengan menggunakan ukuran *Consumer Price Index* atau *Producer Price Index*. Jenis-jenis inflasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan sumber atau penyebabnya kenaikan harga yang berlaku terdiri dari inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya dan inflasi impor.
2. Berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga yang berlaku terdiri dari inflasi merayap, hiperinflasi dan inflasi sederhana.

Jumlah pengangguran (*unemployment*) sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi produksi barang dan jasa yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja semakin tinggi kesempatan penduduk usia produktif untuk bekerja. Pengangguran terjadi bila ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2006). Terdapat 2 jenis pengangguran sbb

1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya terdiri dari pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural dan pengangguran teknologi.
2. Jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja terdiri dari pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman dan setengah menganggur.

Beberapa hal penyebab terjadinya pengangguran sebagai berikut : 1) jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang, 2) kemajuan teknologi, 3) keterampilan dan pengalaman tidak sesuai kriteria, 4) rendahnya pendidikan, 5) kemiskinan , 6) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 7) persaingan pasar global, 8) sulitnya mencari lowongan pekerjaan, 9) harapan calon pekerja terlalu tinggi. Dampak pengangguran bagi perekonomian negara sbb: 1) penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita, 2) penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, 3) meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, 4) menambah hutang negara. Sedangkan dampaknya bagi masyarakat sbb : 1) menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan, 2) menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial, 3) pengangguran menjadi beban psikis dan psikologis bagi penganggur atau keluarga, 4) dapat memicu terjadinya aksi kejahatan.

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan pada pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera Barat berupa data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran tahun 2014 – 2018. Populasi penelitian 19 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Barat. Teknik sampling yang digunakan *nonprobability sampling* dengan sampling jenuh (*sensus*) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan jumlah populasinya relatif sedikit (Sugiyono, 2014). Data penelitian kuantitatif dikumpulkan melalui studi pustaka berupa data panel sebagai unit-unit individu yang sama dan diamati dalam kurun waktu tertentu. Kelebihan penelitian menggunakan data panel sbb : data lebih normatif, variabelitasnya lebih besar, kolineariti lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas serta lebih efisien sehingga dapat mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan oleh data data *cross section* dan *time series*. Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks tentang perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2012).

Definisi operasional masing-masing variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) menurut BPS sbb : kemiskinan (Y) yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan diukur dalam satuan persentase. Pertumbuhan ekonomi (X_1) yaitu perubahan nilai barang atau jasa dari setiap lapangan usaha yang dihitung dari angka PDRB ADHK 2010 pada masing-masing

kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat diukur dalam satuan persentase. Inflasi (X_2) yaitu kenaikan harga barang dan jasa sebagai kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara diukur dalam satuan persentase. Pengangguran (X_3) yaitu rasio pencari kerja dengan angkatan kerja dalam satuan persentase. Analisis data menggunakan regresi linier berganda $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ dengan program SPSS. Uji parsial dan simultan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut : jika $p\text{ value} < 0,05$ maka signifikan atau $t\text{ hitung} \geq t\text{ tabel}$ dan jika $p\text{ value} > 0,05$ maka tidak signifikan atau $t\text{ hitung} < t\text{ tabel}$. Begitu juga untuk uji simultan jika $p\text{ value} < 0,05$ maka signifikan atau $F\text{ hitung} \geq F\text{ tabel}$ dan jika $p\text{ value} > 0,05$ maka tidak signifikan atau $F\text{ hitung} < F\text{ tabel}$. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2002).

HASIL

Menurut BPS (2019) provinsi Sumatera Barat berada di pantai Barat Tengah meliputi daratan dan kepulauan terletak pada $0^0 54'$ Lintang Utara dan $3^0 30'$ Lintang Selatan serta $98^0 36'$ dan $101^0 53'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $42.229,13\text{ km}^2$ setara dengan $2,17\%$ luas wilayah negara Republik Indonesia. Propinsi Sumatera Barat sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan provinsi Jambi dan Bengkulu, sebelah Timur dengan provinsi Riau dan sebelah Barat dengan Samudera India. Ketinggian permukaan daratan provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi dimana sebagian daerahnya berada pada daerah dataran tinggi kecuali kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan kota Padang. Kondisi alam Sumatera Barat terdiri dari kawasan hutan $60,59\%$ dari keseluruhan, luas lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian $28,55\%$. Selain itu juga terdiri dari kawasan hutan lindung $45,17\%$ dari luas keseluruhan, luas lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya $54,82\%$. Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yang terbagi dalam 144 kecamatan terdiri atas 53 nagari, 1974 kelurahan dimana kepulauan Mentawai memiliki wilayah luas daerah terluas $6,01$ ribu km^2 dan kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil hanya 23 km^2 .

Jumlah penduduk miskin berfluktuatif setiap tahunnya di provinsi Sumatera Barat seperti data pada Tabel 1. Menurut BPS (2019) jumlah penduduk miskin tertinggi di kota Padang 44.044 orang dan terendah di kota Sawahlunto 1.480 orang. Sedangkan persentase penduduk miskin paling tinggi di kepulauan Mentawai $14,44\%$ dan terendah di kota Sawahlunto $2,39\%$. Begitu juga garis kemiskinan tertinggi di kota Padang Rp $507/\text{kap}/\text{bulan}$ dan terendah di kepulauan Mentawai Rp $294/\text{kap}/\text{bulan}$. Hal ini terjadi karena kondisi geografis kota Padang umumnya daerah pantai sehingga sumber pendapatan masyarakat di sektor perikanan sebagai nelayan. Juga karena adanya pengurangan lahan yang sudah dijadikan untuk industri dan perkantoran. Meskipun kepulauan Mentawai kondisi geografisnya hampir sama dengan kota Padang tetapi sumber pendapatan masyarakat tidak hanya di sektor perikanan tapi juga di sektor pertanian dan perdagangan. Kondisi geografis kota Sawahlunto sebagai daerah perbukitan dan pegunungan jumlah penduduk miskin relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lainnya di provinsi Sumatera Barat dimana sumber pendapatan masyarakatnya sudah cukup bervariasi dari berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan dan jasa. Kota Sawahlunto sebagai kota tambang batu bara sejak zaman dahulu sumber pendapatan masyarakat sudah cukup bervariasi dari berbagai sektor juga sebagai salah satu daerah pemekaran yang sudah dapat mengembangkan kotanya sesuai dengan kondisi yang dimilikinya.

Pertumbuhan ekonomi kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Barat yang tidak merata dan perbedaan lapangan usaha potensial pada masing-masing lapangan usaha sehingga kebijakan pembangunan ekonomi berbeda dalam menggunakan potensi sumber daya lokal. Sesuai UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah masing-masing daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing daerah bebas menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya sehingga kemampuan Pemerintah Daerah menjadi semakin penting dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan karena sektor yang belum diketahui keunggulannya sulit untuk dikembangkan. Adanya perbedaan kegiatan ekonomi di setiap kabupaten / kota di provinsi Sumatera Barat mempengaruhi kondisi perekonomian masing-masing kabupaten / kota yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Kebijakan pembangunan saat ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi di Sumatera Barat tahun 2018 cukup

terkendali sesuai dengan perkiraan stabilnya harga sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini rentan sebagai penyebab inflasi. Terkendalnya inflasi tahun 2018 didorong oleh stabilnya harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabe merah yang mengalami penurunan harga secara signifikan dimana komoditas ini sangat rentan sebagai penyebab inflasi di Sumatera Barat. Cabe merah sepanjang tahun 2018 justru mengalami deflasi 0,36% dan komoditas lainnya yang menyumbang deflasi seperti kentang, emas perhiasan, kelapa dan petai masing-masingnya 0,03%. Inflasi di kota Padang 2,55% dan Bukittinggi 2,99% menjadi barometer ekonomi Sumatera Barat sepanjang tahun 2018. Sedangkan per Desember 2018 inflasi kota Padang 0,16% ditopang oleh kenaikan tarif angkutan udara, beras dan bawang merah serta di Bukittinggi 0,41% dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pokok. Dalam mengatasi inflasi Kepala Daerah harus lebih peka dalam memantau harga kebutuhan pokok di daerah dan menjaga koordinasi antar daerah dalam menjaga pasokan. Untuk mengatasi pengangguran pemerintah provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa kegiatan program peningkatan kesempatan kerja berupa pelatihan wira usaha baru melalui tenaga kerja mandiri, pelatihan keterampilan terapan teknologi tepat guna, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (*job fair*), kegiatan penyiapan tenaga kerja berbasis kompetensi, *job canvassing* dan bursa kerja *online*. Hasil olahan data didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 179,02 - 0,087X_1 - 0,033X_2 + 0,006X_3 + e$$

(-0,259) (-0,317) (0,053)

F hitung = 0,781 dan F tabel = 4,53

R = 0,866 R² = 0,949 Adjusted R Square = 0,549

Interpretasi persamaan regresi linier berganda di atas sebagai berikut :

- a = 179,02 berarti jika pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran *ceteris paribus* maka kemiskinan sebesar 179,02%
- b₁ = -0,087 berarti jika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka kemiskinan turun sebesar 0,087% dengan asumsi inflasi dan pengangguran *ceteris paribus*.
- b₂ = - 0,033 berarti jika inflasi naik 1% maka kemiskinan turun sebesar 0,033% dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran *ceteris paribus*.
- b₃ = 0,006 berarti jika pengangguran naik 1% maka kemiskinan naik sebesar 0,006% dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi *ceteris paribus*.

Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan karena $-0,259 < 0,05$ dan $-0,033 < 0,005$ sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena $0,053 > 0,05$ sehingga hipotesis penelitian ditolak. Pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan F hitung $< F$ tabel ($0,781 < 4,53$) sehingga pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Hapsari, 2017) bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran dengan kemiskinan hubungannya kuat (R = 0,866) dan kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran sebesar 94,9% sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Begitu juga kemiskinan mampu dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran 54,9% dan sisanya 45,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

SIMPULAN

Hasil persamaan regresi linier berganda pada 19 kabupaten / kota provinsi Sumatera Barat didapat $Y = 179,02 - 0,087X_1 - 0,033X_2 + 0,006X_3 + e$, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan secara parsial. Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara simultan. Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran menjelaskan kemiskinan di Sumatera Barat 54,9% sedangkan sisanya 45,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model penelitian. Untuk penelian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan di provinsi Sumatera Barat seperti investasi, pengeluaran pemerintah dan variabel lainnya serta disarankan agar dapat menambah data panel penelitian. Untuk mengurangi pengangguran agar tenaga kerja terserap diharapkan kepada pemerintah perlu

memberikan pelatihan keahlian dalam bekerja di bidang tertentu. Selain itu diharapkan juga kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat agar mengalokasikan dana pelatihan untuk tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, Afyana dan Mike Triani. 2018. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten / Kota Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*. 1(3). September 2018 : 1 – 10.
- Badan Pusat Statistik 2019. *Sumatera Barat Dalam Angka 2019*. Padang : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Survei Ekonomi Nasional*. Padang : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten / Kota Tahun 2018*. Jakarta. BPS.
- Case & Fair. 2006. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Damodar, Gujarati. 2012. *Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Dwihapsari, Yulianita Ratna. 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2000 – 2015*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Elly M.Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana.
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nanga, Muana. 2001. *Makroekonomi : Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Raharja, Prathama dan Manurung Mandala. 1999. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Samuelson, Paul dan Nordhaus, William D 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Media Global Edukasi.
- Sugiyono. 2014. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukiro, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Todaro, M.P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Yanuar. 2009. *Ekonomi Makro : Suatu Analisis Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta : Yayasan Mpu Artajaya.